

NASKAH AKHIR  
07 Januari 2011  
Pukul 15.00 WIB.



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2010-2011**

**SENIN, 10 JANUARI 2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI**  
**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**  
**PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III**  
**TAHUN SIDANG 2010-2011**

**SENIN, 10 JANUARI 2011**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,**  
**Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**  
**Hadirin yang berbahagia,**

Pada hari ini, Dewan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011 yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 8 April mendatang. Masa Persidangan III ini akan berlangsung selama 63 hari kerja atau 89 hari kalender.

Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan Masa persidangan III ini, Pimpinan Dewan perlu memberitahukan adanya surat masuk dari Saudara Presiden tertanggal 27 Desember 2010. Surat ditujukan kepada Ketua DPR-RI perihal permohonan pertimbangan bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Polandia untuk Republik Indonesia. Sesuai ketentuan perundangan, surat tersebut akan diproses sesuai mekanisme dan prosedur Tata tertib DPR-RI.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Mendahului pidato pembukaan Masa Sidang ini, izinkanlah melalui mimbar yang terhormat ini, Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal bagi yang merayakannya, dan Selamat Tahun Baru 2011 bagi segenap Bangsa Indonesia. Semoga tahun ini lebih sukses dan lebih baik dari tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan Bangsa Indonesia senantiasa memperoleh limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah SWT sehingga sepanjang tahun 2011 dapat kita jalani dengan lebih baik lagi. Amin.

Tahun 2010 baru saja berlalu. Secara umum kondisi kehidupan bangsa tahun 2010 berjalan secara dinamis, meskipun secara politik masih ditandai hal-hal yang kontraproduktif dan melelahkan. Proses politik belum sepenuhnya mencerminkan irama politik yang mengagungkan kebersamaan di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kinerja DPR juga masih banyak mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Untuk itu, perlu ada penguatan kelembagaan, baik lembaga DPR sebagai lembaga politik wakil rakyat maupun Sekretariat Jenderal sebagai lembaga pendukung. Kita semua berharap penguatan kelembagaan tersebut antara lain dengan reformasi birokrasi kesekjenan dapat kita laksanakan pada tahun 2011. Pimpinan Dewan berharap sepanjang 2011, kinerja dan citra lembaga DPR semakin meningkat, yang ditandai dengan adanya proses politik yang efektif dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dalam rangka turut mengambil peranan dalam pembangunan bangsa.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada Masa Persidangan III ini, Dewan akan melaksanakan fungsi dan wewenang konstitusionalnya baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Di samping pelaksanaan 3 fungsi ini, penetapan pejabat publik juga akan dilaksanakan, yaitu penetapan anggota Ombudsman melalui mekanisme DPR dan pemberian pertimbangan kepada calon Duta Besar Luar Biasa negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Di bidang legislasi, untuk Prolegnas tahun 2011, ada 70 RUU yang menjadi prioritas, terdiri dari 37 RUU merupakan inisiatif DPR dan 33 RUU dari Pemerintah. Beberapa RUU yang menjadi prioritas tahun 2011 di antaranya adalah RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan sebagainya.

Selain 70 RUU Prioritas, dalam Prolegnas tahun 2011 juga ada 5 RUU Kumulatif Terbuka, yaitu RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam Prolegnas tahun 2011 tersebut, sebanyak 16 RUU sudah dalam proses Pembicaraan Tingkat I dan 5 RUU dalam proses harmonisasi. Dengan demikian, 16 RUU siap memasuki Pembicaraan Tingkat II pada Masa Persidangan III dan IV, atau pada kwartal pertama tahun 2011 yang akan datang.

Mengingat banyaknya RUU yang harus diselesaikan pada tahun 2011 ini, Pimpinan Dewan berharap pelaksanaan fungsi legislasi dapat semakin meningkat. Pembahasan RUU hendaknya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan lebih menekankan pembahasan pada substansi materi, khususnya bagi alat-alat kelengkapan Dewan yang ditugaskan untuk menanganinya. Pimpinan mencermati, bahwa hampir semua Komisi Dewan dan Baleg terlibat dalam proses penanganan fungsi legislasi. Oleh karena itu, Pimpinan mengharapkan agar dalam setiap pembahasan RUU mutlak memerlukan kehadiran para Anggota Dewan, sehingga rapat pembahasan RUU dapat berjalan sesuai dengan agenda. Pimpinan Dewan akan berusaha mencari beberapa langkah terobosan, melalui pertemuan konsultasi Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-Fraksi, dan Pimpinan Baleg dalam waktu dekat. Kepada Saudara Presiden, kami mengharapkan adanya kerjasama dan tekad yang sama untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU yang telah ditetapkan menjadi prioritas RUU untuk tahun 2011, sehingga kedua pihak mampu menuntaskannya dengan baik. Dengan koordinasi yang lebih baik dan belajar dari pengalaman tahun 2010, Pimpinan Dewan berharap kinerja legislasi tahun 2011 akan jauh lebih baik dari tahun 2010.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Masih terkait dengan bidang legislasi, RUU Partai Politik yang merupakan salah satu paket UU bidang politik telah disetujui menjadi UU pada Masa Sidang II yang lalu. Dalam perubahan UU tentang Partai Politik tersebut, dicantumkan secara tegas bahwa Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik dalam Undang-Undang ini diarahkan dalam 2 (dua) hal utama yaitu: *Pertama*, membentuk sikap dan perilaku positif yang terpola atau sistemik, sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Partai Politik juga perlu memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai. *Kedua*, memaksimalkan fungsi Partai Politik, baik fungsi terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif.

Partai Politik adalah jantungnya demokrasi, demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa adanya partai politik. Partai politik adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu penyempurnaan UU tentang Partai Politik dari waktu ke waktu memang diperlukan, disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Kami mengharapkan agar pembahasan tentang RUU bidang politik lainnya, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu perlu

segera diselesaikan dalam Masa Sidang III ini. Tertundanya penyelesaian RUU tersebut dikhawatirkan akan mengganggu persiapan Pemilu 2014. Di samping itu, dikhawatirkan juga dapat mengganggu proses pembahasan RUU bidang politik lainnya yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan RUU tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selain RUU Partai Politik, RUU lainnya yang telah disetujui menjadi UU pada Masa Sidang II yang lalu adalah RUU tentang Perubahan Atas UU No. 40 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Berdasarkan UUD Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sebagai upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya, rumah harus dimiliki setiap keluarga, terutama bagi masyarakat.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Sebagai pelaksanaan fungsi Dewan di bidang anggaran, pada Masa Persidangan III ini, Dewan akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2010 dan APBN 2011 yang baru akan dilaksanakan. Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan APBN 2010, Dewan berpendapat bahwa peranan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih belum optimal. Dewan sangat mengharapkan setiap pengeluaran 1 rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan memiliki dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Dewan tidak hanya menyoroti besaran anggaran negara, melainkan juga menaruh perhatian pada masalah penyerapan anggaran. Sebagaimana diketahui, jumlah anggaran belanja negara setiap tahun terus meningkat. Dewan memahami salah satu faktor yang menghambat penyerapan anggaran adalah kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dalam melaksanakan anggaran. Untuk itu, Dewan menghimbau sebaiknya ada terobosan dalam mekanisme pelaksanaan anggaran, yakni dengan aturan yang lebih fleksibel terkait belanja negara, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk menghindari tradisi penyerapan anggaran, yang pada umumnya dilakukan menjelang akhir tahun. Penyerapan anggaran yang dimulai sejak awal tahun anggaran akan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.

Dalam evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2010, Dewan memberikan catatan bahwa proporsi dan alokasi APBN tahun 2010, sebagian besar hanya untuk membayar utang, subsidi, dan belanja pegawai. Namun pada tahun 2011 ini, Dewan mengapresiasi pemerintah yang sudah meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBN 2011, misalnya untuk infrastruktur. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan ada *output* dalam mengelaborasi APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2011. Pertumbuhan seharusnya memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yang tergambar dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan makin berkurangnya angka kemiskinan.

Dewan mengakui, banyak tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun 2011. Tantangan terberat berkaitan dengan pengendalian inflasi dan adanya lonjakan harga-harga kebutuhan bahan pokok. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) awal Januari, inflasi tahun 2010 mencapai angka 6,96%, jauh melampaui asumsi target inflasi sebesar 5,3% sebagaimana yang telah disetujui Pemerintah dan DPR dan telah dituangkan dalam UU APBN 2010. Kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok, sangat memprihatinkan, seperti harga pangan dan komoditas pertanian.

DPR mendesak Pemerintah dan Bank Indonesia, untuk lebih intensif mengelola sumber-sumber penyebab inflasi. Masalah ini jelas, yang terkena dampak adalah rakyat kecil yang berpenghasilan rendah/pas-pasan. Daya beli akan berkurang, dan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, ujung-ujungnya kualitas kehidupannya menurun. Dan lebih memprihatinkan lagi apabila kesenjangan sosial akan makin melebar karena permasalahan ini.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Krisis keuangan yang melanda negara-negara di kawasan Eropa, harus mendapatkan perhatian pemerintah. Negara-negara yang tergabung dalam zona Euro kini sedang mengalami krisis keuangan yang cukup hebat, akibat defisit keuangan yang diikuti dengan kesulitan pembayaran utang. Pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia adalah bahwa perluasan krisis tidak dapat dicegah. Karena itu Pimpinan Dewan mengharapkan agar pemerintah Indonesia senantiasa mewaspadaai krisis keuangan yang tengah berlangsung di Eropa, meskipun saat ini krisis ini belum terlalu berdampak terhadap Indonesia. Pengoreksian atas ketidakseimbangan perekonomian perlu dilakukan, agar serangkaian langkah tegas dapat dilakukan pemerintah, agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis keuangan seperti yang sedang melanda Eropa.

Pada sisi lain, Dewan masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah dan PT. Pertamina mengenai rencana pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun 2011. Hal ini dimaksudkan agar dapat diantisipasi dampak sosial-ekonomi

masyarakat dan lonjakan inflasi yang ditimbulkannya, memperhitungkan nilai keekonomian serta memastikan kesiapan berbagai infrastruktur dan efektifitasnya di lapangan. Selama ini subsidi bahan bakar minyak masih dinikmati oleh rata-rata masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah dan tinggi. Dewan mengharapkan ada kesepakatan dengan pemerintah, bahwa yang seharusnya mendapat subsidi tentunya masyarakat yang kurang mampu melalui perbaikan kebijakan yang benar-benar dapat dilaksanakan dengan efektif tanpa menimbulkan gejolak. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu mewaspadaikan meningkatnya harga minyak dunia yang dapat menembus angka 100 dollar AS per barel karena berbagai faktor, antara lain cuaca dingin yang ekstrim di Eropa dan Amerika. Kekhawatiran ini perlu, karena Indonesia masih mengimpor minyak 160.000 barel per hari.

Dewan juga selalu memperhatikan dan memantau terhadap kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat. Seperti adanya keputusan pemerintah yang akan melakukan impor beras, dalam rangka menjaga kestabilan pasokan untuk mengantisipasi gangguan produksi petani beras akibat perubahan iklim. Demikian pula, kebijakan pemerintah terhadap masalah gula. Dewan akan terus mengikuti perkembangan tentang niat pemerintah untuk merevisi tata niaga gula, yang memungkinkan impor gula rafinasi untuk industri yang bisa masuk ke pasar konsumen umum. Dewan khawatir dengan kebijakan ini, Indonesia akan dibanjiri gula impor, sehingga mengakibatkan kebangkrutan petani tebu dan industri gula nasional. Sekali lagi Dewan menekankan perlunya pemerintah mengkaji secara mendalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat, agar tidak menimbulkan gejolak yang akan mengganggu pengelolaan ekonomi secara keseluruhan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Masih berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2010, pada bulan Desember 2010, Dewan telah menyetujui dana APBN yang dialokasikan untuk remunerasi dan reformasi birokrasi bagi 6 kementerian/lembaga. Selain untuk prajurit TNI dan Polri, remunerasi juga diberikan kepada pegawai golongan bawah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam). Remunerasi dibayarkan mulai Juli 2010.

Remunerasi ini merupakan bentuk penghargaan, terutama bagi prajurit TNI dan Polri yang bertugas di perbatasan. Terkait dengan remunerasi, ada beberapa catatan dari Komisi I, II dan III, yaitu lembaga-lembaga yang mendapat remunerasi diminta untuk bisa memperbaiki kinerja, karena kinerja tersebut akan menentukan besarnya remunerasi ke

depan, apakah remunerasi bisa ditambah, tetap sama, berkurang, atau justru tidak mendapatkan sama sekali, sesuai dengan hasil evaluasi.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Di samping pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran, Dewan juga akan melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh alat-alat kelengkapan Dewan, khususnya komisi-komisi di DPR-RI. Fungsi pengawasan ini sangatlah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sebagaimana yang telah dicita-citakan selama ini. Dalam hal ini, pengawasan perlu difokuskan pada isu-isu strategis yang sedang berkembang yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan rakyat yang menjadi amanat bagi Dewan selaku wakil rakyat di negeri ini.

Dalam rangka melakukan fungsi ini, DPR telah membentuk tim-tim pengawas untuk kasus-kasus tertentu, seperti Tim Khusus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Tim Pengawas Bencana Alam. Di samping itu, berbagai Tim Pengawas yang telah dibentuk sebelumnya juga masih akan melanjutkan tugasnya pada Masa Sidang III ini, yaitu Tim Pengawas DPR-RI terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century, dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Berbagai masalah lainnya yang telah mendapat perhatian Dewan sepanjang masa reses antara lain penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki 5 kewenangan yaitu menguji UU terhadap UUD Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR RI bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Selama tahun 2010, tercatat ada 230 perkara Pemilukada yang masuk ke MK.

MK adalah garda terdepan dalam menegakkan konstitusi. MK perlu menjaga kredibilitasnya dan bersih dari berbagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan menaruh perhatian atas adanya isu suap di MK. Pimpinan Dewan berharap kasus ini dapat ditangani secara tuntas, agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan kepercayaan publik terhadap MK dapat terjaga.



Masih terkait dengan masalah penegakkan hukum, kembali kita dipermalukan adanya dugaan Gayus HP Tambunan dapat melenggang ke luar negeri sementara dia berada di dalam tahanan Brimob Kelapa Dua. Kalau dugaan ini benar, berarti lembaga penegak hukum kembali tercoreng. Oleh karena itu kasus ini dapat menjadi momentum bagi pembenahan dan reformasi total sistem dan manajemen keimigrasian RI. Karena itu kasus ini harus dituntaskan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2010, telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) Monitoring Pemilu pada tahun 2010 oleh Komisi II DPR-RI. Panja ini memberi fokus perhatian kepada permasalahan penganggaran, aturan/ketentuan yuridis, penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan. Permasalahan yang ditemukan terkait dengan harmonisasi aturan/ketentuan yuridis penyelenggaraan Pemilu, adalah adanya tumpang tindih antara UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Tumpang tindih banyak ditemukan pada perangkat peraturan di bawah UU, yakni peraturan pemerintah, dan banyak lagi ditemukan di tataran peraturan yang dibuat institusi KPU, juga peraturan menteri dan surat edaran menteri.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa masalah pokok yaitu penyusunan daftar pemilih sangat tergantung pada implementasi UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Jika sudah terimplementasi *Single Identity Number (SIN)*, maka permasalahan daftar pemilih diharapkan akan terselesaikan.

Hal lain adalah perlunya diatur tentang persyaratan yang lebih ketat bagi peserta Pemilu, seperti memiliki rekam jejak yang baik, dan kemampuan manajerial guna meminimalisir adanya politik dinasti dan politik etnisitas. Dalam konteks pengawasan, peran pengawas selama ini masih kurang signifikan dalam menciptakan Pemilu yang fair dan demokratis. Pembentukan Panwas yang dibatasi oleh kurun waktu dalam menjalankan tugas sebelum tahapan dimulai dan berakhir sesudah pengumuman hasil Pemilu, cenderung terlampaui. Oleh karena itu, keterbatasan waktu pembentukan Panwas, terkait tugas dan wewenangnya, menunjukkan pentingnya keberadaan Panwas sebagai institusi yang permanen.

Berkaitan dengan monitoring Pemilu pada tahun 2010, DPR-RI melalui Komisi II akan serius melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan Pemilu, agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lebih baik.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Permasalahan lain yang muncul dalam bahasan adalah berkaitan dengan reformasi birokrasi. Reformasi kepegawaian merupakan salah satu sub-sistem reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi kepegawaian. Dalam reformasi kepegawaian maka subsistem yang harus direformasi adalah sistem perekrutan, penggajian, pengukuran kinerja, pembinaan dan pola karier, promosi dan pengawasan terhadap etik dan perilaku PNS. Upaya yang tidak sistematis dan komprehensif, hanya akan menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi.

Berkaitan dengan masalah ini, Komisi II mempertimbangkan perlunya revisi UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang merupakan perubahan UU No. 8 Tahun 1974. UU tersebut belum mampu mengakomodir dinamika permasalahan-permasalahan kepegawaian yang terjadi, serta tidak mampu mewujudkan PNS yang profesional, sejahtera dan netral. Peraturan pemerintah (PP) di bidang kepegawaian sebagai pedoman operasional pelaksanaan UU Kepegawaian masih belum dapat menjadi panduan bagi tata kelola sistem kepegawaian sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, UU tersebut belum mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Profesionalisme masih sekedar menjadi amanat UU, begitu juga dengan kesejahteraan dan netralitas PNS di dalam birokrasi pemerintahan.

### **Sidang Dewan yang saya hormati,**

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Pimpinan Dewan menaruh perhatian atas laporan Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR-RI. Tim Pengawas telah melaporkan bahwa pelaksanaan Ibadah Haji 2010, masih menyisakan banyak catatan yang harus diperbaiki demi tercapainya sistem penyelenggaraan haji yang berkeadilan, profesional, akuntabel, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan jamaah. Masih banyak ditemukan kendala-kendala seputar sumber daya manusia (SDM), transportasi, pemondokan, kesehatan, akomodasi, katering dan keamanan.

Di bidang SDM, masih ditemukan adanya petugas yang tidak kompeten di bidangnya, seperti Tenaga Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang belum pernah berhaji dan kurang memahami berbagai aspek ibadah haji, sehingga mengalami hambatan dalam memberikan bimbingan kepada jamaah. Dari sisi transportasi, masih terjadi penundaan penerbangan. Dari sisi pemondokan, masih ditemukan keluhan tentang ruangan kamar yang terlalu sempit serta jarak yang cukup jauh dari lokasi ibadah. Demikian pula dengan penyediaan makanan masih banyak keluhan. Yang juga memprihatinkan adalah banyaknya jamaah haji dengan kategori resiko tinggi yang lolos pemeriksaan kesehatan di daerah.

Untuk itu Dewan mendesak, agar Pemerintah di masa depan mempersiapkan pelaksanaan Haji secara lebih baik, dengan merancang sistem organisasi yang rapi dan antisipatif, garis koordinasi yang jelas, memilih dengan ketat dan tegas perusahaan-perusahaan yang dijadikan rekan kerja di Arab Saudi. Kiranya Laporan Tim Pengawas Haji dapat menjadi bahan masukan terhadap rencana revisi UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dewan memberikan perhatian yang besar terhadap kinerja Kementerian Pendidikan Nasional, karena *output*-nya yang sangat penting demi terciptanya masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut pemerintah didorong untuk merencanakan kebijakan yang tepat sasaran dan berpandangan jauh kedepan, dengan mengoptimalkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi belanja pusat, belanja daerah, dan dana pengembangan pendidikan. Persetujuan Dewan atas alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD harus dimanfaatkan dengan baik, yang pemanfaatannya akan terus dikawal oleh Dewan dan masyarakat.

Masalah lain yang menjadi perhatian Dewan dalam bidang sosial adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak-anak yang tinggal di perbatasan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Panja Anak Komisi VIII DPR RI. Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan catatan yang sangat mengkhawatirkan, bahwa sepanjang tahun 2010 kasus pengaduan anak hilang mencapai 110 kasus. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga menerima sebanyak 2.335 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan 62,7 persen diantaranya adalah kekerasan seksual dan selebihnya kekerasan fisik dan psikis.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum juga makin meningkat dari tahun ke tahun. Kenyataan bahwa adanya kondisi LAPAS yang tidak memisahkan antara anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa sungguh sangat memprihatinkan. Anak rentan mengalami eksploitasi dan LAPAS justru berpotensi menjadi tempat anak-anak belajar hal-hal negatif dari tahanan dewasa, kondisi ini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Anak-anak yang tinggal di perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara sebab menemui kendala untuk menempuh pendidikan formal mengingat fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Buruknya kondisi sosial dan ekonomi di perbatasan membawa dampak lainnya bagi anak-anak tersebut yaitu potensial untuk menjadi korban perdagangan anak. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap

masalah ini, mengingat anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan dipersiapkan menjadi generasi penerus, pemimpin masa depan bangsa.

Dalam pada itu, Dewan mengingatkan Pemerintah bahwa berbagai bencana alam belum akan berakhir. Indonesia masih berada pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, paling tidak sampai dengan bulan Februari. Masyarakat perlu waspada, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki curah hujan tinggi, tanah longsor, termasuk wilayah lereng Merapi dan gunung Bromo. Banjir lahar dingin Merapi masih menghantam sejumlah wilayah disekitarnya. Infrastruktur penanggulangan bahaya sudah tidak memadai lagi. Kita senantiasa diingatkan bahwa fenomena alam merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, kita, masyarakat dan Pemerintah, harus banyak belajar dari kejadian-kejadian bencana alam yang senantiasa berulang kembali. Penanganan para pengungsi juga merupakan persoalan tersendiri dan harus dilakukan pendekatan pemberdayaan sosial ekonomi melalui program-program pemerintah secara komprehensif dan berkesinambungan

#### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Beberapa indikator *Millenium Development Goals (MDGs)* secara nasional memang telah berhasil diraih. Namun demikian, kinerja tetap harus ditingkatkan mengingat masih terdapat sasaran-sasaran MDGs yang belum terpenuhi, bahkan untuk target penurunan angka kematian ibu, pengendalian penyakit HIV dan AIDS dan upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup masih membutuhkan kerja keras kita semua. Selain itu, disparitas pencapaian MDGs antar daerah juga masih tinggi.

Panja MDGs BKSAP sebagai *focal point* DPR-RI dalam mengawal pencapaian MDGs di Indonesia, pada akhir masa kerja tahun 2010, telah menghasilkan beberapa rekomendasi bagi Dewan dan pemerintah. Kepada Dewan, Panja merekomendasikan agar kinerja di bidang legislasi ditingkatkan, khususnya dalam mempercepat pembahasan RUU yang mendukung pencapaian target MDGs. Demikian pula mengenai fungsi anggaran, yang berkaitan besaran anggaran kementerian/lembaga dengan perimbangan pusat-daerah yang lebih adil, meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran pada sektor-sektor tersebut. Untuk pemerintah, Panja mendesak diperkuatnya fungsi koordinasi kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan pencapaian target MDGs, untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program-program di lapangan, mengimplementasikan anggaran responsif gender dan *pro-poor budget*, serta menerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk pencapaian program-program MDGs.

#### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Sepanjang bulan Desember 2010, energi masyarakat Indonesia dari semua lapisan diguncang oleh euphoria kegembiraan karena prestasi yang diukir oleh Tim Nasional

Sepakbola Indonesia. Sampai babak semifinal Piala AFF, Tim Nasional telah mengukir kemenangan sempurna, walaupun akhirnya terhenti pada babak final. Skwad "merah-putih" mampu menarik dukungan luar biasa penonton Indonesia yang sportif dan tertib, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap kebangkitan olahraga sepakbola perlu diapresiasi. Satu hal yang dicatat dalam euphoria ini adalah bahwa prestasi tim nasional kita telah menjadi **alat ampuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme, Cinta Indonesia** dan telah **berhasil menyatukan bangsa**, walaupun Tim Nasional gagal menjadi juara.

Kini, setelah semuanya berakhir, kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa masyarakat menghendaki persepakbolaan di tanah air harus dikelola dengan manajemen yang baik oleh organisasi PSSI. Oleh karena itu, pimpinan dan pengurus PSSI harus mendengar kritikan masyarakat agar dalam organisasi ini dilakukan pembenahan, revitalisasi, demi kemajuan olahraga yang sangat diminati masyarakat Indonesia.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Terkait dengan beragamnya permasalahan internasional yang dihadapi di masa mendatang, Pimpinan Dewan mendukung keinginan Pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota PBB. Negara-negara tersebut antara lain: Nauru, Tuvalu, Republik Afrika Tengah, Malawi, Botswana, Sao Tome and Principe, Equatorial Guinea, Chad, Nigeria, El Salvador, dan beberapa negara lain. Upaya ini kami anggap positif terutama dalam peningkatan kerja sama internasional seperti dalam hal penanganan isu pemanasan global dan perubahan iklim, kerja sama di bidang ekonomi dan politik, serta memaksimalkan perlindungan terhadap WNI di negara-negara tersebut.

Pembukaan Kedutaan Besar Indonesia yang baru di negara-negara sahabat menjadi penting artinya bila mengingat semakin meningkatnya peran diplomatik Indonesia di kawasan Asia. Seperti pada tanggal 9-10 Desember di Bali, Indonesia berhasil menyelenggarakan *Bali Democracy Forum* (BDF) yang bertujuan menciptakan forum kerjasama kawasan Asia guna mendorong pembangunan politik, melalui dialog dan pertukaran pengalaman, guna memperkuat institusi demokrasi di kawasan. Yang tidak kalah pentingnya adalah posisi Ketua ASEAN yang akan diduduki Indonesia pada tahun 2011 ini. Pimpinan Dewan mengharapkan agar dengan posisi sebagai Ketua ASEAN, Indonesia mampu meningkatkan secara efektif perannya di fora internasional dalam ikut menangani masalah-masalah Internasional maupun regional yang berdampak terhadap perdamaian internasional. Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN memiliki tantangan yang besar karena Indonesia selama ini dipandang oleh negara-negara di ASEAN dan dunia sebagai negara yang mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan regional.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak akan dapat mengacuhkan kondisi eksternal yang kemungkinan harus dihadapi. Berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional di tahun 2010 akan tetap berdampak terhadap Indonesia di tahun 2011, seperti krisis keuangan yang kini terjadi di negara-negara kawasan Eropa, masalah stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur serta masalah yang terkait dengan perubahan iklim. Semuanya itu bersifat multidimensional dan terjadi secara bersamaan. Yang paling penting, karakter lintas-batas dan bahkan global dari berbagai tantangan ini mengingatkan kita bahwa solusi hanya dapat diupayakan melalui kerjasama internasional.

Dalam konteks Perubahan Iklim, Pimpinan Dewan melihat kegagalan perundingan Perubahan Iklim (COP-16) di Cancun, Meksiko, tanggal 29 November hingga 10 Desember, telah memberi pesan kuat kepada kita semua, bahwa negara-negara maju belum memperlihatkan kemauan yang kuat untuk secara bersama-sama mengatasi masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Pimpinan Dewan berharap, kegagalan perundingan di Cancun ini tidak menyurutkan keinginan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon seperti yang sudah dikomitmenkan sebelum ini. Sebab, walaupun hasil akhir dari pertemuan di Cancun tidak menyatakan kata sepakat, tetapi komitmen penurunan emisi Indonesia sebesar 26%, telah mendapat apresiasi oleh berbagai kalangan karena adanya kajian tingkat nasional dan provinsi yang membuktikan bahwa hal tersebut dapat terlaksana.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Kasus internasional yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah yang terkait di bidang keamanan. Meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea perlu kita cermati bersama karena dipastikan akan mempengaruhi keamanan negara-negara yang berada di sekitarnya. Jalur perdagangan dan supply minyak yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Barat akan terpengaruh jika eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea terus meningkat. Pimpinan Dewan mendesak Pemerintah segera memanfaatkan hubungan baiknya dengan semua pihak yang terkait konflik di Semenanjung Korea untuk meredam ketegangan agar tidak berkembang menjadi perang terbuka.

Kejadian selanjutnya yang masih hangat dibicarakan saat ini adalah kasus kebocoran dokumen rahasia oleh situs WikiLeaks. Kasus ini setidaknya memberi pelajaran bagi Indonesia untuk terus mewaspadaai bahaya kebocoran rahasia negara. Dari "kasus WikiLeaks" ini Indonesia perlu meninjau, merevisi serta memperketat sistem informasi intelijen serta menata ulang dan meningkatkan standarisasi pengiriman, penyimpanan, dan dokumentasi data intelijen agar kebocoran dokumentasi dapat dihindari

### **Sidang Dewan yang Terhormat**

Sehubungan dengan peran diplomasi parlemen, perlu kami sampaikan bahwa pada bulan Januari ini DPR RI akan mengirimkan delegasinya untuk mengikuti Sidang Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam yang akan berlangsung di Abu Dhabi, tanggal 15-19 Januari 2011 dan Sidang *Asia-Pacific Parliamentary Forum* (APPF) yang akan berlangsung pada tanggal 23-27 Januari 2011 di Ulan Bator, Mongolia.

DPR-RI menganggap penting untuk berpartisipasi dalam kedua *event* internasional tersebut. Selain dalam kerangka peningkatan diplomasi parlemen, keikutsertaan delegasi RI, diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan nasional, serta ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Demikianlah hal-hal yang perlu kami kemukakan dan menjadi pokok-pokok kegiatan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011 yang menjadi perhatian Dewan dalam kerangka pelaksanaan tiga fungsi Dewan. Selanjutnya dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah Robbil'Alamin*, maka Rapat Paripurna ini, kami nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. *Amin ya robbal 'Alamin*. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

KETOK 3 X

Jakarta, 10 Januari 2011

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**DR. H. MARZUKI ALIE**